



## Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: [snip.eng.unila.ac.id](http://snip.eng.unila.ac.id)



### Peran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Menjawab Isu-Isu Strategis Kewilayahan di Provinsi Lampung

F K Utomo<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Provinsi Lampung, Jalan Z.A. Pagaralam KM. 11, 35145

#### INFORMASI ARTIKEL

#### ABSTRAK

##### Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021

Direvisi 18 November 2021

Diterbitkan 24 Desember 2021

##### Kata kunci:

Infrastruktur

Jalan

Kemantapan

Konektivitas

Rendahnya konektivitas Barat-timur dan Utara Selatan menyebabkan terjadinya disparitas pengembangan wilayah di Provinsi Lampung. Kondisi ini menyebabkan permasalahan sosial yang cukup besar, diantaranya adalah kemiskinan. Hal ini menjadi *concern* dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Lampung yang menjalankan sebagian tugas dan kewenangan di Bidang Kebinamargaan, yaitu penyediaan infrastruktur jalan untuk membangun konektivitas di Provinsi Lampung. Metode penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data sekunder. Pelaksanaan tupoksi yang dijalankan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung yaitu peningkatan konektivitas jalan melalui peningkatan jalan mantap di era pandemic ini menimbulkan permasalahan yakni adanya kendala ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan tupoksi, Dinas BMBK terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis agar peningkatan kemantapan jalan dan peningkatan konektivitas tetap terlaksana. Diantaranya dengan meningkatkan kemantapan jalan yang diprioritaskan pada ruas-ruas jalan strategis penggerak ekonomi kewilayahan, agar ketika ruas jalan prioritas tersebut ditingkatkan kemantapan jalannya maka akan meningkatkan konektivitas yang ditandai dengan distribusi logistik dapat berjalan lancar sehingga dapat mendongkrak ekonomi wilayah setempat. Selain itu, Dinas BMBK juga harus mencari upaya pendanaan infrastruktur secara kreatif sehingga pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi tetap berjalan, Penataan kembali fungsi dan status jalan, mendorong peningkatan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/kota.

#### 1. Pendahuluan

Rendahnya konektivitas wilayah Barat-Timur dan Utara Selatan menyebabkan disparitas perkembangan wilayah di Provinsi Lampung. Pada Tahun 2018, Indeks Konektivitas Provinsi Lampung masih sebesar 6,01. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kondisi jalan mantap yang ada di provinsi Lampung dan belum terkoneksinya pusat-pusat aktivitas penduduk. Isu disparitas wilayah dan akses terhadap infrastruktur pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial yang cukup besar bagi masyarakat Lampung, khususnya terkait kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 12,62 persen, persen tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar 9,41 persen. (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kemiskinan juga berpengaruh terhadap isu keamanan wilayah. Tingkat kriminalitas di Provinsi Lampung masih cukup tinggi dimana terjadi 10.485 kejahatan dilaporkan di Tahun 2016 dan meningkat menjadi 11.089 kasus di Tahun 2017. Permasalahan lain terkait juga pada kualitas

\*Penulis korespondensi.

E-mail: [fkhendia@gmail.com](mailto:fkhendia@gmail.com)

pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Lampung pada Tahun 2018 telah berjalan dengan realisasi sebesar 69,02 tetapi masih di bawah capaian Nasional sebesar 71,39 di tahun yang sama. Dilihat dari sisi perekonomian Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Tahun 2018 sebesar 5,25%, berada di atas Nasional (5,17%) dan rata-rata Sumatera (4,54%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang. Sementara pendapatan per kapita Provinsi Lampung hanya sebesar 39,86 Juta, masih jauh di bawah capaian Nasional yaitu sebesar 56 Juta. Potret kondisi Provinsi Lampung diatas menunjukkan Provinsi Lampung belum bisa dikatakan Provinsi yang memiliki prestasi baik meskipun secara kekuatan dan peluang, Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat baik, misalnya potensi dari sisi lokasi berada di gerbang Pulau Sumatera, kemudian dari sisi sumber daya alam memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan potensi-potensi lainnya.

Oleh karenanya, peran stakeholders untuk saling bersinergi untuk kemajuan Provinsi Lampung merupakan tugas dan tantangan berat yang harus segera dilaksanakan. Hal ini juga merupakan *concern* dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai bagian dari Pemerintah yang menjalankan sebagian tugas dan kewenangan di Bidang Kebinarmargaan, yaitu penyediaan infrastruktur jalan untuk membangun konektivitas di Provinsi Lampung.

## 2. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metodologi kualitatif (Despa, 2018) dengan mengumpulkan data sekunder yang kemudian diolah menjadi informasi (Romana, 2021), membangun kategori-kategori, mencari pola-pola, mengembangkan sampai menemukan hipotesis baru.

### 2.1 Sumber Data dan Lokasi Penelitian

Sumber data diperoleh dari survey instansional yaitu Badan Pusat Statistik dan Dinas BMBK Provinsi Lampung. Lokasi penelitian yaitu di seluruh ruas jalan kewenangan provinsi sejumlah 99 ruas yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

## 3. Pembahasan

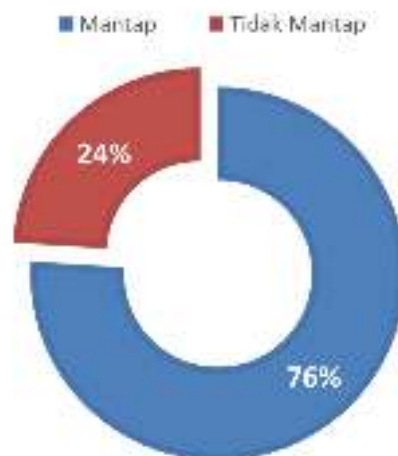
Sesuai dengan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi paling dekat dengan Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, yaitu Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.

Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung yang berasal dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata yang tersebar di wilayah barat-timur dan utara-selatan dan didukung oleh posisi yang strategis yakni di gerbang pulau Sumatera merupakan kekuatan yang harus dioptimalkan keberadaannya. Selain itu keberadaan jalan tol Sumatera serta pelabuhan laut juga merupakan potensi yang dapat mendukung distribusi hasil industri dan juga mendukung sektor pariwisata.

Namun demikian, kekuatan dan peluang yang dimiliki Provinsi Lampung tersebut diatas belum didukung oleh konektivitas wilayah Barat-Timur dan Utara Selatan sehingga terjadi disparitas pengembangan wilayah. Bahan mentah, dan hasil-hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan tidak dapat terdistribusi dengan baik, arus wisatawan menuju lokasi-lokasi wisata terhambat. Infrastruktur jalan di Provinsi Lampung memang dalam kondisi kurang baik. Banyak potensi sumber

daya yang mestinya bisa dikembangkan optimal terhambat karena rendahnya akses jalan. Sebut saja komoditi unggulan seperti udang, gula, sawit dan produk-produk hasil hilirisasi produk pertanian lain yang memiliki pasar internasional. Di sektor pariwisata potensi alam Lampung yang sudah dikenal luas wisatawan sampai saat ini masih sulit untuk berkembang karena rendahnya akses terhadap jalan.

Peningkatan konektivitas wilayah melalui peningkatan kemandapan jalan merupakan sasaran utama dalam mengatasi disparitas pengembangan wilayah di Provinsi Lampung. Bagaimana tidak, seluruh kegiatan masyarakat hampir seluruhnya bergantung pada sektor transportasi, dan infrastruktur jalan pada khususnya. Terhambatnya akses masyarakat karena jalan rusak mengakibatkan kerugian yang cukup besar, tidak hanya ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan dan keamanan. Distribusi logistik dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran bergantung sepenuhnya pada infrastruktur jalan. Arus ekonomi selalu mengedepankan akses terhadap transportasi jalan sebagai pembuka dan syarat investasi. Infrastruktur jalan menjadi syarat utama dalam suksesnya pengembangan suatu wilayah. Kalau jalannya bagus mulus, menjadi penanda daerah tersebut akan maju. Kelancaran arus transportasi yang didukung oleh aktivitas perekonomian yang baik tentu akan berpengaruh positif pada ekonomi makro yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat.



**Gambar 1.** Kondisi Kemandapan Jalan 2020

Sesuai Rencana Strategis tahun 2019-2024, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kemandapan jalan. Tahun 2021 target 80% dicapai dengan realisasi sebesar 76,045%, dan diharapkan terus dapat meningkat setiap tahunnya, yakni mencapai target 83% di tahun 2024. Kondisi kemandapan jalan ini akan dijaga dan terus ditingkatkan melalui pemeliharaan rutin (untuk menjaga kemandapan jalan), pemeliharaan berkala jalan, Rehabilitasi jalan, dan Rekonstruksi jalan setiap tahunnya. Pada Tabel 1 berikut disajikan kondisi kemandapan jalan Tahun 2020.

**Tabel 1.** Kondisi Kemandapan Jalan 2020

Keterangan	Satuan
Panjang keseluruhan	1693,273 Km
Jumlah ruas	99 ruas
Jumlah koridor	16 koridor
Mantap	76,045%
Tidak Mantap	23,995%
Baik	64,446%
Sedang	11,599%

Rusak Ringan	14,140%
Rusak Berat	9,815%

Selain peningkatan kondisi kemandapan jalan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi juga berupaya melakukan peningkatan konektivitas menuju pusat-pusat distribusi melalui Jalan Tol Trans Sumatera (*Backbone*) dan juga peningkatan konektivitas pada ruas jalan provinsi menuju lokasi bahan mentah dan industri pengolahan serta pasar local (*fishbone*). Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 240 Km terbentang dari Bakauheni sampai Pematang Panggang serta keberadaan Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu masuk-keluar arus barang dari dan menuju Pulau Jawa merupakan potensi yang dimiliki Provinsi Lampung. Apabila sektor-sektor produksi sudah berkembang dengan baik, hilirisasi produksi pertanian dan tanaman pangan dan sektor-sektor lain sudah terlaksana, maka mobilisasi hasil produksi ke pusat-pusat distribusi baik di dalam wilayah maupun keluar wilayah diarahkan menuju Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pada perkembangannya, tingkat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) aktivitas keluar masuk tol yang melintasi ruas provinsi akan terus meningkat. Hal ini tentu perlu penanganan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk melaksanakan pelebaran akses masuk dan keluar tol yang melintasi ruas provinsi, sehingga diharapkan dapat menunjang sektor ekonomi wilayah sekitar, baik dari sisi produksi, bahan mentah, dan sisi distribusi dan pemasarannya (terkoneksi) maupun menunjang sektor pariwisata, dan ini juga harus didukung dengan oleh kemandapan jalan provinsi yang baik (*Fishbone*).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan sebagian kewenangannya di bidang kebinamargaan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menghadapi beberapa kendala diantaranya kendala anggaran (*budget constraints*), yakni kendala anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan adanya rasionalisasi (efisiensi) anggaran akibat pandemic covid 19. Namun demikian, Adanya komitmen Gubernur Lampung tentang program prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan juga komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mendukung kemandapan ruas jalan provinsi melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor pendorong bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk terus menjalankan tupoksinya melalui berbagai upaya-upaya diantaranya melalui peningkatan kondisi kemandapan jalan provinsi dengan prioritas pada ruas jalan strategis penggerak ekonomi kewilayahan, upaya strategi pendanaan infrastruktur secara kreatif untuk mengatasi kendala *Budget Constraint*, Penataan kembali fungsi dan status jalan, mendorong peningkatan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/kota.

### 3. Kesimpulan

Pelaksanaan sebagian kewenangan bidang kebinamargaan yang dijalankan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung yaitu peningkatan konektivitas jalan melalui peningkatan jalan mantap di era pandemic ini menyebabkan anggaran yang diperlukan minim tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Oleh karenanya, Dinas BMBK terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis agar peningkatan kemandapan jalan dan peningkatan konektivitas tetap terlaksana. Diantaranya dengan meningkatkan kemandapan jalan yang diprioritaskan pada ruas-ruas jalan strategis penggerak ekonomi kewilayahan, agar ketika ruas jalan prioritas tersebut ditingkatkan kemandapan jalannya maka distribusi logistic dapat

berjalan lancar sehingga dapat mendongkrak ekonomi wilayah setempat. Selain itu, Dinas BMBK juga harus mencari upaya pendanaan infrastruktur secara kreatif sehingga pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi tetap berjalan diantaranya penataan kembali fungsi dan status jalan, mendorong peningkatan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/kota.

### Daftar pustaka

- Badan Pusat Statistik (2021), Statistik Indonesia 2021, Jakarta
- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 2020, Data Kondisi Jalan, Provinsi Lampung.
- Despa, D., Nama, G. F., Muhammad, M. A., & Anwar, K. (2018, April). The implementation Internet of Things (IoT) technology in real time monitoring of electrical quantities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 335, No. 1, p. 012063). IOP Publishing.
- Romana, I., Nama, G. F., & Septama, H. D. (2021). Analisa Performance Jaringan Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) Universitas Lampung. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(1).